



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SUB UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YAYAT NURHAYAT
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 485605

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 730.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m2/120 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
2. Tanah Seluas 505 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000
3. Tanah Seluas 225 m2 di KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/36 m2 di KOTA SALATIGA ,
HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 40.000.000

1. MOTOR, HONDA NC1183C A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
5.000.000
2. MOBIL, HONDA CITY SX8 GM Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp.
35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 193.497.797

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 963.497.797

III. HUTANG Rp. 24.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 939.497.797

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.